



**INFORMASI**  
**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2008 KEPADA MASYARAKAT**

---

***PENGANTAR***

***BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM***  
***ASSALAMU'ALIKUM Wr. Wb.***

Syukur Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wata'ala Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya. Sebagai bentuk perwujudan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perkenankan kami atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008.

Penyampaian ILPPD merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang harus disampaikan pemerintah daerah, yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Di dalam Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini memuat berbagai implementasi kebijakan pemerintahan daerah, yang mengakumulasi antara proses perencanaan pemerintahan daerah, pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan oleh seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pengawasan seluruh kegiatan beserta peran serta masyarakat daerah yang merupakan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dengan menetapkan konsepsi pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan seluruh komponen pembangunan untuk mencapai kemandirian daerah yang kita kenal dengan nama GERBANG DAYAKU. Oleh karena itu, keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan maupun persoalan yang masih ditemui dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan

tanggungjawab bersama dari seluruh perangkat daerah dan masyarakat dibawah koordinasi Kepala Daerah.

Besar harapan kami semoga dengan adanya Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ini, akan dapat memberikan informasi yang lebih obyektif terhadap seluruh upaya perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan pembangunan bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan visi dan misi Gerbang Dayaku yang telah divitalisasi dan diaktualisasi.

*WASSALAMU'ALAIKUM Wr. Wb.*

Tenggarong, Juli 2009  
Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,  
  
Drs. H. Sjachruddin MS, MM



## PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyampaian ILPPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008 merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam perspektif amanah dan substansi pemerintahan tersebut, penyampaian *progress* kinerja pemerintahan daerah, sekaligus merefleksikan akuntabilitas bersama antara kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat. Hal demikian merupakan konsekuensi atas berbagai kesepakatan bersama dalam memaknai kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang telah dituangkan dalam APBD Tahun 2008. Dengan demikian, mekanisme ILPPD merupakan wahana untuk saling berbagi peran dalam menganalisis kondisi kinerja pemerintahan daerah, yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2008. Kiranya hal tersebut akan semakin mendorong tumbuhnya semangat obyektivitas dan kemitraan yang harmonis, dalam menyempurnakan kinerja pemerintahan daerah di masa mendatang.

Dalam kerangka memelihara kemitraan untuk pengelolaan pemerintahan daerah, sejak awal kami telah berusaha seoptimal mungkin melakukan *interpretasi* atas beragam aspirasi kebutuhan masyarakat, yang telah diterjemahkan dalam dokumen perencanaan daerah, baik untuk kurun 5 (lima) tahunan maupun rencana kerja tahunannya. Dengan demikian, pemaknaan kinerja pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2008, tidak akan terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2010, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2008.

Fokus dari semua dokumen perencanaan tersebut, pada dasarnya adalah sebuah kerangka kerja untuk mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Pembangunan yang tertuang dalam Gerbang Dayaku tahap II, Visi Kutai Kartanegara, yakni, "**Menghasilkan Pemerintahan Kabupaten yang baik dan bersih berlandaskan asas Keadilan, Kesetaraan, Keragaman dan Demokrasi menuju terbentuknya masyarakat yang Berkualitas, Maju, Mandiri dan Sejahtera**"

Dalam upaya memperkokoh pencapaian visi Kutai Kartanegara dimaksud, pemerintah daerah terus mengupayakan beragam alternatif kebijakan operasionalnya, yang disusun dalam kerangka rencana pembangunan pembangunan lima tahunan, yakni "*Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat guna mendukung pencapaian visi Kutai Kartanegara 2010*". Dengan memadukan 3 (tiga) misi, yakni:

1. Pemberdayaan pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) dan penegakan supremasi hukum.
2. Pemberdayaan seluruh komponen ekonomi.
3. Pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi.

Seiring dengan itu, maka berdasarkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara kedepan memprioritaskan tiga bidang pengembangan, yaitu:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (*Human Resources*)
2. Pengembangan Pertanian dalam arti luas (*Agriculture*)
3. Pengembangan industri pariwisata dan Kutai Kartanegara sebagai tujuan wisata (*Tourism*)

Ketiga bidang ini akan menjadi tumpuan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara masa depan yang terus digali, dikembangkan dan ditingkatkan.

Pencapaian visi dan misi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya dapat diukur dari berbagai indikator kinerja seperti Indek Pembangunan Manusia. Dalam penghitungan IPM terdapat tiga faktor penilaian yang sangat penting yaitu *tingkat kesejahteraan masyarakat, derajat pendidikan, dan derajat kesehatan*. Berikut disampaikan gambaran kinerja indikator makro pembangunan maupun indikator sosial ekonomi Kabupaten Kutai kartanegara tahun 2008 antara lain :

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), merupakan indikator keberhasilan pembangunan manusia di Kutai Kartanegara yang telah disepakati dalam RPJMD Kutai Kartanegara 2005 - 2010. IPM Kutai Kartanegara pada tahun 2008 adalah sebesar 72,9 bila dibandingkan dengan target IPM dalam RPJM-D Kutai Kartanegara tahun 2010 adalah sebesar 73 maka sampai dengan tahun 2008 masih terdapat gap sebesar 0,1 poin.

Indeks Pendidikan (IP), yang dipengaruhi oleh *Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)*. AMH di Kutai Kartanegara telah mencapai angka sebesar 97,46 persen pada Tahun 2008 atau terdapat kenaikan sebesar 1,05 persen dibandingkan dengan AMH tahun 2007. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat 2,54 persen penduduk Kutai

Kartanegara yang belum bisa membaca dan menulis. Penduduk Kutai Kartanegara yang masih buta aksara sebagian besar yaitu penduduk usia lanjut dan penduduk yang secara geografis sulit menjangkau sarana dan prasarana pendidikan. Berkaitan dengan RLS Tahun 2008 sebesar 9,4 tahun, menunjukkan rata-rata penduduk Kutai Kartanegara baru mencapai tingkat pendidikan SMP.

**Indeks Kesehatan (IK)**, sebagai salah satu komponen penting dalam perhitungan IPM yang mempresentasikan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Dari sisi Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan bahwa rata-rata usia penduduk Kutai Kartanegara adalah 70,21. hal ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan angka harapan hidup maksimal standar UNDP adalah sebesar 85 tahun.

**Indeks daya beli masyarakat**, Kutai Kartanegara pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 624.010,- atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2007 dengan tingkat kemampuan daya beli sebesar Rp. 622.800. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan daya beli penduduk antara lain karena cukup tingginya perkembangan harga kebutuhan rumah tangga.

**Proporsi penduduk miskin.** Pada tahun 2007 tercatat proporsi penduduk miskin dari total keluarga di Kutai Kartanegara sebesar 11,23 persen dan pada tahun 2008 menjadi 11,19 persen.

**Laju Pertumbuhan Penduduk** di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun relatif terus meningkat. Pada tahun 2007 laju pertumbuhan penduduk 2,73 persen sedangkan pada tahun 2008 mencapai 3,66 persen.

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu melalui program Keluarga Berencana (KB) dan pengendalian administrasi kependudukan. Namun demikian, masih tingginya laju pertumbuhan penduduk adanya migrasi masuk dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM.

Selanjutnya, pembangunan *Ekonomi Makro* di Kabupaten Kutai Kartanegara masih mengandalkan pada eksploitasi Sumberdaya Alam. Hal ini tergambar dari total PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2008 yang mencapai Rp. 76,383 Triliun, peranan sektor Pertambangan dan Penggalian sampai saat ini masih mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara yakni sebesar 84,74 persen sedangkan sektor Pertanian menyumbang sebesar 6,41 persen, sektor bangunan menyumbang 3,23 persen sedangkan sektor perdagangan, hotel dan

restoran menyumbang 2,36 persen dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2008.

Berdasarkan kondisi obyektif tersebut di atas, Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini masih sangat tergantung pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan hal ini disadari makin lama akan berkurang, menipis dan habis. Oleh karenanya, perlu dilakukan transformasi ketergantungan terhadap sumber daya alam secara bertahap dari eksploitasi sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui, kepada pengembangan sumberdaya yang dapat diperbaharui, ditingkatkan dan dikembangkan di masa mendatang.

### ***PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI***

Sebagai gambaran kinerja Pemerintah Daerah dalam Tahun 2008, perkenankan saya menyampaikan tolok ukur kinerja pembangunan di Kutai Kartanegara, yang dijabarkan pada tiga misi akselerasi dan telah dirinci ke dalam langkah operasional tahunan daerah, yang secara umum diarahkan untuk mampu mencapai tujuan dan fokus yang telah disepakati selama kurun waktu 2005-2010.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula ditetapkan sebesar Rp. 5,598 Trilyun kemudian dirasionalisasikan menjadi sehingga menjadi Rp. 4,949 Trilyun. Hal ini disebabkan dalam perkembangannya asumsi Pendapatan Daerah yang semula ditetapkan sebesar Rp. 4,648 Trilyun ternyata hanya menjadi sebesar Rp. 3,950 Trilyun.

Berikut ini akan saya sampaikan hasil-hasil pembangunan secara garis besar pada masing-masing urusan yang dikelompokkan sesuai dengan 3 (tiga) strategi pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008. Sedangkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan secara rinci telah dituangkan dalam Buku II Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008 yang tidak terpisahkan dengan laporan ini.

#### **A. Strategi Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik**

Pelaksanaan strategi meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prima dimaksudkan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencapai kinerja pemerintahan yang optimal, yang ditentukan oleh kemampuan, kapasitas dan kualitas daerah dalam hal pelayanan publik.

Dalam implementasinya, pengembangan kapasitas dan kualitas pelayanan publik yang telah dilakukan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

## I. URUSAN WAJIB

### i. BIDANG PENDIDIKAN

Dalam kaitannya dengan peningkatan kapasitas, kualitas dan kuantitas, baik untuk pelaksanaan maupun pelayanan di bidang pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pada tahun anggaran 2008 telah dialokasikan dana untuk pelaksanaan program-program yang terinci ke dalam 7 program tersebut sebesar Rp. 419,565 Milyar dengan penyerapan dana sebesar Rp. 324,209 Milyar untuk pencapaian pelaksanaan fisik sebesar 77,27 %.

Pelaksanaan pembangunan bidang Pendidikan diarahkan pada Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan menengah, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Program Pendidikan Tinggi.

### ii. BIDANG KESEHATAN;

Untuk meningkatkan mutu serta jumlah sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, maka pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Kesehatan telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 55,393 Milyar dan terealisasi sebesar Rp. 24,541 Milyar atau 43,87 % yang pemanfaatannya diarahkan pada pelaksanaan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.

Sementara itu alokasi dana kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Rumah Sakit A. M. Parikesit sebesar Rp. 13,687 Milyar mampu

diserap sebesar Rp. 10,936 Milyar atau sekitar 79,92 % dengan prioritas pada pelaksanaan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin serta Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.

Sedangkan anggaran yang dialokasikan melalui Rumah Sakit Umum Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja sebesar Rp. 6,292 Milyar mampu direalisasikan mencapai 96 % atau sebesar Rp. 6,034 Milyar yang peruntukannya adalah untuk membiayai Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata serta Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.

iii. BIDANG PENATAAN RUANG;

Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kaitannya dengan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, maka telah dialokasikan melalui APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 melalui Bappeda dan Bagian Tata Pemerintahan sebesar Rp. 8,256 Milyar dan yang direalisasikan untuk membiayai program dan kegiatan penataan ruang sebesar Rp. 5,918 Milyar (71,68 %)

iv. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN;

Dalam kaitannya dengan proses dan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan serta pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, pada tahun anggaran 2008 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 44,211 Milyar dengan realisasi pelaksanaan mencapai 82,22 % atau sebesar Rp. 36,348 Milyar yang dialokasikan untuk pelaksanaan Program Pengembangan data/informasi, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan Sosial Budaya dan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

v. **BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;**

Melalui program Penataan Administrasi Kependudukan, dari alokasi dana alokasi sebesar Rp. 7,269 Milyar telah direalisasikan sebesar Rp. 6,901 Milyar (94,94 %) dengan keluaran berupa Penataan Administrasi Kependudukan, Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu, Penyajian Informasi & Publikasi Data Kependudukan Capil & KB, Pengawasan Warga Negara Asing (WNA ), Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pelayanan Akta Capil dll.

vi. **BIDANG KETENAGAKERJAAN;**

Untuk bidang urusan ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menganggarkan sebesar Rp. 4,980 Milyar dan terealisasi sebesar 49,27 % atau sekitar Rp. 2,453 Milyar yang dipergunakan dalam rangka implementasi Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan kesempatan kerja dan Program Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

vii. **BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA;**

Urusan wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera hanya menyerap anggaran sebesar Rp. 1,341 Milyar dari alokasi sebesar Rp. 2,850 Milyar atau sekitar 47 % dengan output berupa Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, Perlindungan Hak Reproduksi Remaja, Penyusunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB.

viii. BIDANG PERHUBUNGAN;

Urusan Perhubungan merupakan salah satu urusan yang sangat berperan dalam pengembangan sistem transportasi baik lingkup kabupaten maupun antar wilayah kecamatan dan desa. Hal tersebut mengingat bahwa sarana dan prasarana transportasi antar wilayah masih sangat terbatas dan relatif sulit. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pada tahun anggaran 2008, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan dana APBD Kabupaten untuk urusan Perhubungan sebesar Rp. 111,372 Milyar. Dari alokasi dana tersebut, penyerapan anggaran hanya mencapai Rp. 46,663 Milyar atau sebesar 41,9 %.

Dari alokasi dana tersebut, pelaksanaan pembangunan bidang Perhubungan diprioritaskan untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan serta Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.

ix. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;

Melalui Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dari alokasi sebesar Rp. 11,804 Milyar dapat dimanfaatkan sebesar Rp. 5,501 Milyar (46,6 %) dengan keluaran berupa Aplikasi E-Gov (Simtap dan Simkeu), Implementasi telekomunikasi daerah serta Aplikasi E-Procurement.

x. BIDANG PERTANAHAN;

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2,333 Milyar untuk urusan bidang Pertanahan pada Tahun 2008, Dinas Pertanahan hanya mampu memanfaatkannya sebesar 57,85 % atau senilai Rp. 1,349 Milyar yang dipergunakan untuk Program pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah, Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah serta Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.

xi. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI;

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 10,388 Milyar untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri telah mampu menyerap sebesar 67,53 % atau sebesar Rp. 7,015 Milyar yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan serta Program Pendidikan Politik Masyarakat.

xii. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN;

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah di masing-masing SKPD dengan alokasi belanja sebesar Rp. 827,326 Milyar melaksanakan program dan kegiatan mencapai 66,78 % atau sebesar Rp. 552,524 Milyar.

Realisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditempuh dalam rangka meningkatkan mutu, disiplin, etos kerja dan profesionalisme lembaga dan aparatur dalam menjalankan pemerintahan telah menyerap anggaran sebesar Rp. 38,192 Milyar atau sekitar 61,14 % dari alokasi sebesar Rp. 62,531 Milyar.

Untuk melaksanakan program pengawasan pembangunan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Bawaskab Kutai Kartanegara telah menyerap dana sebesar Rp. 830,303 juta dari alokasi sebesar Rp. 2,300 Milyar atau hanya 36,10%.

Selain itu dalam rangka meningkatkan mutu dan profesionalisme aparatur untuk dapat menjalankan pemerintahan yang akuntabel serta untuk konsolidasi lembaga dan aparatur guna menjamin kelangsungan pemerintahan yang baik, maka pada tahun anggaran 2008 melalui program Penelitian umum dengan alokasi dana sebesar Rp. 8,213 Milyar dan direalisasikan sebesar Rp. 7,194 Milyar atau 87,59 %.

Program Penataan Peraturan Perundang Undangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 9,381 Milyar dapat direalisasikan sebesar Rp. 4,470 Milyar (47,65 %)

Sedangkan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat khusus, serta dalam rangka evaluasi pelaksanaan otonomi daerah maka melalui Bagian Kesra dan Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyerap dana sebesar Rp. 5,988 Milyar dari alokasi sebesar Rp. 10,750 Milyar (55,70 %)

Khusus di bidang kehumasan, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun anggaran 2008 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 11,764 Milyar dengan realisasi hanya 33,79 % atau sebesar Rp. 3,975 Milyar

xiii. **BIDANG SOSIAL;**

Dalam Pencapaian Program dan kegiatan Pembangunan bidang urusan sosial yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2008 dari alokasi dana sebesar Rp. 13,949 Milyar dengan realisasi mencapai 84,32 % atau sebesar Rp. 11,761 Milyar. Pelaksanaan pembangunan bidang Sosial diarahkan pada implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan Anak Terlantar, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) serta Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

xiv. **BIDANG ARSIP**

Untuk urusan Arsip, pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 800 juta. Dari alokasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan sistem administrasi kearsipan sebesar Rp. 799,400 juta (99,93 %) yang diprioritaskan pada pelaksanaan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan serta Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan.

xv. BIDANG PERPUSTAKAAN;

Melalui Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang telah menyerap dana sebesar Rp. 1,927 Milyar atau sebesar 93,66 % dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2,057 Milyar dengan output utama berupa Bahan-bahan Pustaka dan Buku-buku Bacaan, pelaksanaan Rapat Koordinasi pengembangan perpustakaan, Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan dan Pengadaan Mobil Operasional Perpustakaan Keliling.

II. URUSAN PILIHAN

i. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN;

Dari alokasi dana untuk urusan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 2,285 Milyar, penyerapannya sebesar 88,50 % atau senilai Rp. 2,022 Milyar untuk pembiayaan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut, Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan serta Program Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Hayati dan Non Hayati Perairan.

ii. BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;

Urusan bidang Pertanian dan Perkebunan pada tahun anggaran 2008 mampu memaksimalkan penyerapan dana mencapai 91,37 % atau sebesar Rp. 3,359 Milyar dari alokasi sebesar Rp. 3,677 Milyar. Pelaksanaan program dan kegiatan difokuskan pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan, Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan untuk Peningkatan SDM Petugas dan Petani Perkebun, Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Tani Perkebunan serta Pembuatan Software Pemetaan dan Media Penyuluhan serta Program Pengembangan Sistem Informasi Perkebunan.

### iii. BIDANG PARIWISATA;

Dari Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata telah diserap dana sebesar Rp. 13,775 Milyar dari alokasi sebesar Rp. 17,773 Milyar atau sebesar 77,51 % yang digunakan untuk memperoleh keluaran berupa Penyelenggaraan Pameran Kewisataan sebanyak 5 kali baik didalam maupun diluar negeri.

Dari kegiatan Penertiban Izin Kepariwisataan ditemukan 68 RM dan 47 Hotel yang belum memiliki izin sedangkan 5 RM dan 19 Hotel telah memiliki izin, Pembebasan lahan Waduk Panji Sukarame seluas 50.000 M<sup>2</sup>.

Sementara untuk pembinaan Seni Budaya/LPKK dihasilkan Pertunjukan seni yang diikuti oleh 399 orang dan 10 group kesenian, Pelatihan terhadap 100 orang seniman bidang Penulisan Sastra, Data aktivitas seni budaya di 18 Kecamatan serta Penyelenggaraan Festival Sepekan Budaya Kutai.

## B. Strategi Memacu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi

Sebagai realisasi pelaksanaan strategi tersebut, pada tahun anggaran 2008, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan dana untuk berbagai program pembangunan dengan realisasi sebagai berikut :

### I. URUSAN WAJIB

#### i. BIDANG PENANAMAN MODAL;

Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pada tahun anggaran 2008 pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 10,465 Milyar yang digunakan untuk promosi dan peningkatan investasi. Dari alokasi tersebut Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat merealisasikannya sebesar Rp. 9,561 Milyar atau 91,37%.

Pemanfaatan anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi serta Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

ii. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH;

Dalam rangka lebih menggairahkan usaha kecil dan menengah serta perkoperasian di Kabupaten Kutai Kartanegara, pemerintah daerah pada tahun anggaran 2008 telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 18,157 Milyar yang sampai pada akhir tahun anggaran hanya mampu dimanfaatkan sebesar Rp. 7,881 Milyar (43,41 %) yang diarahkan pada Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Untuk Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah serta Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

iii. BIDANG KETAHANAN PANGAN;

Melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan dapat diserap dana sebesar Rp. 17,952 Milyar atau sekitar 82,01 dari alokasi sebesar Rp. 21,889 Milyar.

Disisi lain usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan dilakukan melalui Program Pengembangan Pembangunan yang memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 3,162 Milyar atau 35,67 % dari dana yang dialokasikan sebesar Rp. 8,866 Milyar

iv. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

Urusan Pemerintahan Umum dapat dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp. 4,922 Milyar yang dapat diserap sebesar Rp. 3,865 Milyar atau 78,54 % yang dimanfaatkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas, Dari alokasi dana sebesar Rp. 2,243 Milyar untuk pelaksanaan Program

Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedure Pengawasan, Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah serta Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

v. **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;**

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3,250 Milyar. Dari alokasi dana tersebut, penyerapannya mencapai 98,6 % atau sebesar Rp. 3,204 Milyar yang dipergunakan untuk pembiayaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.

II. **URUSAN PILIHAN**

i. **BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN;**

Pengembangan potensi perikanan dan sumber daya kelautan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2008 didukung dengan dialokasikannya dana sebesar Rp. 25,753 Milyar dan telah terealisasi sebesar Rp. 14,802 Milyar (57,48 %).

Implementasi pelaksanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan diarahkan pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Program Pengembangan Budidaya Perikanan serta Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

ii. **BIDANG PERTANIAN;**

Untuk mencapai tujuan transformasi ketergantungan dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui kedalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui, maka melalui program-program di bidang pertanian dan perkebunan untuk memacu pertumbuhan ekonomi telah dianggarkan sebesar

Rp. 28,760 Milyar yang penyerapannya mencapai 84,77 % atau sebesar 24,378 Milyar.

Sementara itu keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam kaitannya dengan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi pada sub sektor peternakan terlihat dari penggunaan dana sebesar Rp. 19,769 Milyar atau 70,83 % dari alokasi sebesar Rp. 27,910 Miliar.

iii. **BIDANG KEHUTANAN**

Untuk urusan bidang Kehutanan hanya mampu menyerap dana sebesar 41,87 % atau Rp. 8,449 Milyar dari yang dianggarkan senilai Rp. 20,179 Milyar

iv. **BIDANG PARIWISATA;**

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam usaha untuk pencapaian prioritas pengembangan industri pariwisata dan Kutai Kartanegara sebagai tujuan wisata adalah melalui alokasi dana sebesar Rp. 23,253 Milyar yang telah diserap sebesar Rp. 20,748 Milyar (89,23 %).

**c. Strategi Meningkatkan pembangunan teritorial**

Strategi meningkatkan pembangunan teritorial merupakan upaya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah perkotaan dengan pedesaan. Adapun program dan kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan pembangunan teritorial dapat disampaikan sebagai berikut :

**I. URUSAN WAJIB**

i. **BIDANG LINGKUNGAN HIDUP;**

Untuk mendukung upaya kebijakan pemerintah daerah melalui strategi meningkatkan pembangunan teritorial pada urusan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2008 telah mengalokasikan anggaran

sebesar Rp. 2,048 Milyar. Dari alokasi tersebut dapat direalisasikan sebesar 87,98 % atau Rp. 1,802 Milyar.

Pelaksanaan pembangunan daerah diprioritaskan pada pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut.

ii. BIDANG PEKERJAAN UMUM;

Pencapaian program pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp. 1.060 Trilyun atau sekitar 67,64 % dari alokasi sebesar Rp. 1,568 Trilyun.

Pembangunan bidang infrastruktur difokuskan pada pelaksanaan program dan kegiatan :

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah,
- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya,
- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata,
- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Penyerapan anggaran pada Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong,
- Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong,
- Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan,
- Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan,

- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan,
- Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya,
- Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku,
- Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya,
- Program Pengendalian Banjir, Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh,
- Program pembangunan infrastruktur perdesaaan,
- Program pengelolaan areal pemakaman,
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga,

iii. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA;

Untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga, pada tahun anggaran 2008 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalokasikan dana sebesar Rp. 11,303 Milyar. Dari alokasi dana tersebut penyerapan sampai akhir Desember 2008 sebesar Rp. 10,138 Milyar atau 89,69 % yang dimanfaatkan untuk pembiayaan Program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.

iv. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;

Melalui Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan dengan alokasi dana sebesar Rp. 2 Milyar dapat diserap 80,78 % atau Rp. 1,615 Milyar.

Pelaksanaan Program Pengembangan Pembangunan melalui Bagian Kesra Pemkab. Kutai Kartanegara dengan serapan dana sebesar Rp. 1,172 Milyar atau 66,99 % dari anggaran sebesar Rp. 1,750 Milyar yang dipergunakan untuk Koordinasi program ZBPA dan Kota Layak Anak (KLA).

v. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN;

Pelaksanaan Program Pengembangan Pembangunan dengan dana sebesar Rp. 4,750 Milyar dan terealisasi sebesar 30,22 % atau Rp. 1,435 Milyar.

Sementara itu untuk Program Pengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 1,535 Milyar telah berhasil menyerap dana sebesar Rp. 661,397 atau 43,07 %.

Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan dana sebesar Rp. 8,250 Milyar dapat direalisasikan sebesar 75,51 % atau Rp. 6,229 Milyar

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilakukan dengan bermodalkan alokasi dana sebesar Rp. 850 juta dengan hasil berupa pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM PNS pada Bagian Pemdes dan Kelurahan yang menelan dana sebesar Rp. 526,460 juta atau 61,94 %

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi dana sebesar Rp. 669,950 juta dapat direalisasikan sebesar 69,57 % atau Rp. 466,060 juta

b. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan yang memanfaatkan dana sebesar Rp. 3,910 Milyar dengan realisasi mencapai 63,37 % atau Rp. 2,477 Milyar

c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa yang telah menyerap dana sebesar Rp. 1,043 Milyar atau 86,97 % dari Rp. 1,200 Milyar yang disediakan dengan keluaran berupa Peningkatan dan Pengembangan SDM serta Fasilitasi tentang Permasalahan Tapal Batas Desa

d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang hanya memanfaatkan dana sebesar 47,35 % atau Rp. 825,985 juta dari alokasi Rp. 1,744 Milyar dengan keluaran berupa Pelatihan Dan Bimbingan Teknis BPD

dalam Wilayah Kab. KUKAR; Rapat Kerja BPD Se-Kab. Kutai Kartanegara serta Penyaringan bagi Kepala Desa.

- e. Program Pembangunan Jaringan Listrik yang penyerapannya mencapai 73,17 % atau Rp. 15,359 Milyar dari alokasi sebesar Rp. 20,993 Milyar

vi. **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;**

Sebagai upaya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pemberdayaan masyarakat, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 meliputi program dan kegiatan yang telah menyerap dana sebesar Rp. 11,680 Milyar atau 76,22 % dari alokasi sebesar Rp. 15,325 Milyar yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

## II. URUSAN PILIHAN

Untuk tahun anggaran 2008 Strategi meningkatkan pembangunan teritorial tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan melalui urusan pilihan.

## PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sementara itu penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat/Departemen Teknis kepada Daerah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan mengenai Dana Tugas Pembantuan diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang berisikan tentang Penjelasan Umum Dana Tugas Pembantuan, Penganggaran, Penyaluran dan Pertanggungjawaban serta Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan umum serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang diselenggarakan secara sinergis dengan pelaksanaan asas desentralisasi. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang

dilaksanakan selama ini adalah kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur.

Dana Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun Anggaran 2008 melalui dana APBN yang sebesar Rp. 15,791 Miliar hanya terserap sebesar Rp. 14,278 Miliar. Sementara dana tugas pembantuan yang bersumber dana dari APBD Propinsi sebesar Rp. 178,900 Miliar mampu terserap sebesar Rp. 81,802 Miliar.

## **PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

Pada hakikatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, sebagaimana pasal 195 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 disebutkan "bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan".

Amanat tersebut merupakan kebijakan yang diberikan kepada daerah untuk mampu berinisiatif mengelola potensi yang ada didaerahnya melalui kerjasama antar daerah maupun melalui kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Pada tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam bidang peternakan. Kesepakatan kerja sama daerah antara ini tertuang dalam MoU nomor 180/MoU-2/HK/2008 tanggal 10 Maret 2008, MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tentang potensi ekonomi kerakyatan. Diharapkan dengan adanya ikatan MoU ini, kedua pemerintah Kabupaten dapat bersama-sama mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan di kedua daerah khususnya dalam bidang peternakan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak melakukan kerjasama antar daerah secara spesifik, akan tetapi hanya berupa berbagi pengalaman dengan daerah lain yang melakukan kunjungan kerja maupun studi banding ke Kabupaten Kutai Kartanegara maupun sebaliknya.

Pada Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah melakukan beberapa kerja sama dengan pihak ketiga. Ikatan kerja sama yang dilakukan dengan beberapa pihak ketiga menyangkut pelaksanaan

beberapa kegiatan yang pembiayaannya dianggarkan melalui APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun beberapa kerja sama Pemkab Kutai Kartanegara dengan pihak ketiga yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- MoU antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan PT Kutai Energi mengenai Rencana Kerja sama Usaha di Bidang Tenaga Listrik. MoU Nomor 180/MoU-1/Hk/2008, dengan *leading sector* pada Bagian Ekonomi Setkab Kutai Kartanegara.
- MoU antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur. MoU Nomor 180/MoU-3/Hk/2008 tanggal 10 Maret 2008, dengan *leading sector* pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setkab Kutai Kartanegara.
- MoU antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Borneo Orang Utan Survival Foundation Kalimantan Timur tentang Pengembangan Hutan Kota. MoU Nomor 180/MoU-4/Hk/2008 tanggal 16 April 2008, dengan *leading sector* pada Dinas Kehutanan.
- MoU antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan PSEKP-UGM tentang Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB) TA 2008. MoU Nomor 180/MoU-5/Hk/2008 tanggal 1 Mei 2008, dengan *leading sector* pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setkab Kutai Kartanegara.
- MoU antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. MoU Nomor 180/MoU-6/Hk/2008 tanggal 30 Juni 2008, dengan *leading sector* pada Dinas Pekerjaan Umum.
- MoU antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Sub Panitia Besar Pekan Olah Raga Nasional XVII - 2008 Kabupaten Kutai Kartanegara. MoU Nomor 180/MoU-7/Hk/2008 tanggal 10 Maret 2008, dengan *leading sector* pada KONI Kabupaten Kutai Kartanegara.
- MoU antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Tim Penyelesaian Mutasi Atlit KONI Kabupaten Kutai Kartanegara. MoU Nomor 180/MoU-8/Hk/2008 tanggal 1 Juli 2008, dengan *leading sector* pada KONI Kabupaten Kutai Kartanegara.
- MoU antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan PS Mitra Kutai Kartanegara. MoU Nomor 180/MoU-9/Hk/2008 tanggal 1 Juli 2008.

- MoU antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan beberapa media mengenai kerja sama halaman media. MoU Nomor 180/MoU-10/Hk/2008 tanggal 3 Juli 2008, dengan *leading sector* pada Bagian Humas dan Protokol Setkab Kutai Kartanegara.
- MoU antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Metro TV tentang Liputan Acara Erau. MoU Nomor 180/MoU-214/Hk/2008 tanggal 2 Desember 2008, dengan *leading sector* pada Bagian Humas dan Protokol Setkab Kutai Kartanegara

Forum koordinasi yang dilaksanakan oleh Pemkab Kutai Kartanegara dengan instansi vertikal maupun unsur Muspida beserta DPRD di daerah pada tahun 2008 berupa penyelenggaraan rapat koordinasi. Rapat koordinasi ini diagendakan secara rutin setiap bulan sebanyak satu kali pertemuan.

Materi rapat atau pertemuan dalam rangka koordinasi selama tahun 2008 meliputi :

- Pembahasan permasalahan di bidang pertambangan yang terkait dengan PT Indomining, CV. Putera Daerah 99 dan CV. Sumber Daya Alam Sanga Sanga
- Pembahasan mengenai Model Kota Layak Anak dengan Tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI Deputy IV Perlindungan Anak.
- Pembahasan mengenai pembentukan Badan Traffic Board di Kabupaten Kutai Kartanegara
- Pembahasan mengenai interkoneksi jaringan telekomunikasi daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- Pembahasan bersama Tim Monitoring dan Evaluasi tentang persiapan Pekan Olah raga Nasional (PON) XVII Tahun 2008 Propinsi Kalimantan Timur
- Pembahasan mengenai persiapan penyambutan atas kedatangan Presiden RI ke Kabupaten Kutai Kartanegara
- Pembahasan mengenai persiapan pelaksanaan HUT RI ke-63 Tahun 2008
- Pembahasan mengenai persiapan pelaksanaan safari Ramadhan ke 18 Kecamatan dan persiapan menyambut Idul Fitri 1 Syawal 1429 H.

- Pembahasan mengenai persiapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Putaran kedua.
- Pembahasan mengenai perhitungan sementara pelaksanaan Pilkada Propinsi Putaran Kedua.
- Pembahasan mengenai persiapan pelaksanaan Erau Adat Kutai Kartanegara Tahun 2008

Dalam rangka penataan batas daerah dengan daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2008, Kebijakan penataan batas wilayah antar kabupaten/Kota yang menjadi acuan adalah Undang-undang nomor 47 Tahun 1999. Hal ini terkait penataan batas daerah Antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, Kota Bontang dan Kabupaten Malinau.

Penataan Batas antar Kecamatan didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1996, Batas alam, dan Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antar unsur pemerintah desa/masyarakat pada dua kecamatan yang berbatasan sebagai referensi dalam penataan batas.

Pedoman Kerja yang dijadikan acuan oleh Tim PBD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan penataan batas antar kabupaten dan antar Kecamatan dalam Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006

Secara umum, bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2008 dapat diuraikan ke dalam beberapa jenis bencana. Bencana yang terjadi selama tahun 2008 menimbulkan kerugian yang relatif besar bagi sebagian korban bencana. Diantaranya yang tergolong dalam bencana alam berupa banjir dan tanah longsor, serta yang tergolong bencana akibat ulah/kelalaian manusia seperti diantaranya kebakaran serta kecelakaan.

Selama tahun 2008, terjadi beberapa peristiwa bencana alam yang meliputi beberapa kecamatan, maupun bencana serta kecelakaan yang terjadi secara sporadis. Bencana/kecelakaan dimaksud adalah :

- Bencana Banjir 3 kali Kejadian.
- Bencana Kebakaran Gedung dan Rumah 20 kali kejadian.
- Kecelakaan Angkutan Sungai 4 kali kejadian.
- Tanah Longsor 1 kali kejadian.
- Gulma 1 kali kejadian.

Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menanggulangi bencana tersebut di atas adalah penyaluran bantuan berupa bahan makanan dan obat-obatan, pembuatan tenda-tenda untuk tempat tinggal sementara maupun bantuan dalam bentuk dana segar untuk rehabilitasi permukiman maupun kebutuhan warga lainnya

Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan bencana yang terjadi, Pemkab melakukan langkah-langkah serta kegiatan antara lain :

- Melakukan Rapat Koordinasi Satlak PB.
- Melakukan Sosialisasi pada Daerah Rawan Bencana.
- Membentuk Unit Operasional PB Kecamatan.
- Mengaktifkan Posko-posko Bencana di masing-masing Desa dan Kecamatan.
- Mengaktifkan sarana Komunikasi, HT dan HP.
- Mengadakan pelatihan dasar SAR Linmas Kabupaten dan Kecamatan.
- Menyiapkan Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana.
- Menyiagakan Ton Inti Linmas di Kecamatan dan Kabupaten.
- Melatih Anggota Linmas Kabupaten dan Kecamatan dalam Penanggulangan Bencana.
- Melakukan Konsultasi dan Koordinasi Bidang Kelinmasan di Propinsi dan Kantor Linmas Samarinda apabila dianggap perlu untuk meminta bantuan personil maupun peralatan.

Beberapa potensi bencana yang diperkirakan dapat terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain Banjir , Kebakaran Gedung/ Bangunan, Kebakaran Hutan/Lahan, Kecelakaan Lalu Lintas Air Sungai dan Laut, Angin Puting Beliung, Tanah Longsor, Gulma Air.

Dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, SKPD yang berkompeten adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Secara umum kondisi ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara cukup baik. Hal-hal yang mengakibatkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban hanya terjadi secara sporadis dan dapat dikategorikan dalam skala yang kecil serta tidak menimbulkan dampak luas bagi wilayah lainnya.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2008 telah terdeteksi Indikasi konflik dan kerawanan sosial khususnya di sekitar areal Pertambangan Batu Bara dan Perkebunan. Namun secara umum, tidak terdapat gangguan atas ketenteraman dan ketertiban umum seperti konflik berbasis SARA, anarkisme ataupun separatisme yang memiliki dampak dengan skala yang cukup luas dan mengganggu jalannya

pemerintahan, pembangunan serta sendi-sendi kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum lebih terfokus pada upaya penciptaan ketertiban umum dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah seperti halnya penertiban IMB, HO, atau razia pelajar.

## **PENUTUP**

Berbagai keberhasilan dan kesuksesan dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, keseluruhannya tidak lepas dari perkenan dan hidayah Allah SWT, yang senantiasa memberikan bimbingan-Nya kepada masyarakat dan para penyelenggara pemerintahan daerah serta adanya kerja keras dan dukungan dari berbagai stake holder pembangunan, terutama dari kalangan DPRD dan masyarakat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2008 belum dapat memenuhi seluruh aspirasi masyarakat maupun menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. Hal ini bukan karena kami tidak atau kurang memperhatikan aspirasi masyarakat tetapi semata-mata hanya karena keterbatasan sumber daya terutama sumber dana, dan tidak semua permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati dan melalui forum yang terhormat ini kami mohon semua pihak dapat memberikan kritik, saran dan pandangan serta masukan yang konstruktif guna perbaikan atau peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah pada tahun-tahun mendatang.